

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman teknologi informasi ini (TI), berkembang pesatnya teknologi dalam berbagai hal dimana segala sesuatu telah berjalan bersama teknologi banyak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap usaha memiliki sebuah sistem informasi yang baik. Dengan adanya sistem informasi yang baik maka akan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai hal yang berhubungan dengan usaha tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah mendorong manusia untuk membantu memudahkan kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu hasil karya dari kemajuan di bidang teknologi adalah komputer. Komputer adalah suatu alat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain dapat diunggulkan dari segi kecepatan bekerja, komputer juga diunggulkan dari segi ketelitian dalam melaksanakan proses dan memberikan ketepatan dalam menghasilkan informasi serta dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Semua ini sulit dilakukan oleh manusia secara manual.

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari aset negara yang wajib dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan publik. Pengelolaan yang tidak tertib, tidak transparan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi sering kali menyebabkan lemahnya kontrol terhadap penggunaan barang milik daerah (Lumingkewas et al., 2025).

Pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek penting dalam administrasi publik yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset pemerintah. Barang milik daerah mencakup berbagai jenis properti, mulai dari tanah, gedung, hingga kendaraan, yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Pengelolaan barang milik daerah mencakup seluruh siklus hidup aset daerah dari perolehan hingga penghapusan, yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai regulasi (Rachman, S. R., 2025).

Pemanfaatan ini bisa dilakukan dengan cara menyewakan, meminjamkan, atau bekerja sama dengan pihak lain agar barang yang tidak terpakai tetap bisa digunakan dan menghasilkan manfaat. Dengan cara ini, barang milik daerah tetap menjadi milik pemerintah, tetapi bisa membantu menambah pemasukan dan tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. (Kementerian Dalam Negeri, 2025)

Di era digital saat ini, banyak instansi pemerintah yang beralih ke sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Sistem informasi yang efektif dapat mempermudah pengawasan, pelaporan, dan pengambilan keputusan terkait barang milik daerah (Fadhilah et al., 2024).

Digitalisasi pengelolaan dan pemanfaatann barang milik daerah (BMD) merupakan langkah strategis dalam mendukung efisisensi an efektivitas tata kelola aset pemerintah daerah. Adanya digitalisasi, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, karena data dapat diakses dan diperbarui secara real tanpa harus melalui proses manual (Rahma Assabilla, 2025).

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang milik daerah antara lain kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan aksesibilitas data yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan semua informasi terkait barang milik daerah dalam satu platform yang mudah diakses (Oktrina, 2025).

Perancangan sistem informasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah berbasis web menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sistem berbasis web, informasi dapat diakses secara real-time oleh seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pejabat daerah dan masyarakat (Hafsari, 2023).

Kantor Camat Sikakap, yang merupakan salah satu unit pemerintahan tingkat kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan publik, koordinasi pembangunan, dan administrasi pemerintahan di wilayahnya. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut, kantor ini dilengkapi dengan berbagai jenis barang milik daerah (BMD), seperti peralatan kantor, kendaraan dinas, peralatan elektronik, serta aset tetap lainnya yang menjadi bagian dari inventaris pemerintah daerah. Barang-barang ini seharusnya dikelola secara tertib, efisien, dan transparan guna memastikan kebermanfaatannya dalam mendukung pelayanan publik yang optimal. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dan pemanfaatan barang-barang milik daerah di Kantor Camat Sikakap hingga saat ini masih dilakukan secara manual atau semi-digital, yang berarti proses pencatatan dan pelaporan masih bergantung pada media konvensional seperti buku besar, dokumen cetak, dan file spreadsheet sederhana seperti Microsoft Excel.

Sistem pencatatan semacam ini memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan yang signifikan. Proses pencatatan secara manual sangat rawan terhadap terjadinya kesalahan input data, kesulitan dalam menjaga konsistensi informasi, serta berisiko tinggi mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen fisik. Di sisi lain, penggunaan aplikasi spreadsheet seperti Excel yang bersifat non-terpusat dan tidak terintegrasi juga menimbulkan sejumlah masalah, seperti duplikasi data, sulitnya mengakses informasi secara bersamaan oleh banyak pengguna, serta tidak adanya sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan potensi manipulasi data. Kondisi ini menghambat proses pelacakan dan identifikasi status aset secara akurat, terutama saat dilakukan audit internal maupun eksternal oleh instansi pengawasan.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan kecepatan, ketepatan, dan akurasi informasi dalam lingkungan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan aset dan barang milik daerah, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi instansi pemerintahan seperti Kantor Camat Sikakap untuk mulai bertransformasi dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi. Informasi yang lambat, tidak akurat, atau tersebar dalam banyak dokumen yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan hambatan serius dalam proses perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset milik pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu membantu dalam proses pencatatan, pemantauan, pelaporan, serta pemanfaatan barang milik daerah secara lebih terstruktur, efisien, aman, dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Salah satu solusi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini adalah penerapan sistem informasi berbasis web. sistem informasi berbasis web juga memungkinkan pengelolaan data secara real-time, di mana setiap perubahan atau pembaruan data akan langsung tercatat dan tersimpan dalam sistem, sehingga meminimalkan terjadinya keterlambatan informasi atau inkonsistensi data. Selain itu, sistem ini mendukung otomatisasi proses administrasi seperti pembuatan laporan, pencatatan mutasi barang, pengelompokan aset berdasarkan kategori, serta pelacakan riwayat pemanfaatan aset. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu perancangan sistem informasi berbasis web untuk membantu Kantor Camat Sikakap dalam melakukan pencatatan barang milik daerah yang lebih baik dan efektif. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki tujuan merancang sistem informasi dengan menuangkan dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul :

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERBASIS WEB DI KANTOR CAMAT SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATA BASE MYSQL”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap sesuatu masalah atau problematika yang muncul. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang masih manual atau semi digital menjadi tidak efektif dalam mendukung kegiatan operasional kantor?
2. Bagaimana kendala yang muncul akibat penggunaan pencatatan manual, seperti keesalahan pencatatan, duplikasi data, dan kehilangan data?
3. Bagaimana dalam mengatasi kesulitan dalam proses pelacakan dan pelaporan barang milik daerah secara cepat dan akurat?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan merancang sistem informasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah berbasis website dapat membantu pencatatan dalam merekap data barang milik daerah dengan mudah pada kantor Camat Sikakap.
2. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam merancang aplikasi sistem informasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang mudah digunakan oleh bagian

pencatatan barang milik daerah (BMD) dapat mengolah data dengan cepat, efisien dan akurat.

3. Diharapkan dengan menggunakan database MySQL data pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) pada kantor camat Sikakap dapat di simpan dengan baik dan aman.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian perlu diterapkan batasan-batasan terhadap sistem yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar langkah pemecahan masalah tidak menyimpang dari hasil laporan penelitian. Adapun batasan masalah penelitian diambil antara lain:

1. Pembuatan program untuk pencatatan dan pelaporan barang milik daerah (BMD) kantor camat sikakap.
2. Sistem dapat di akses oleh pegawai kantor camat sikakap dengan hak akses yang telah di tenttukan.
3. Sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan DataBase MYSQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pembahasan mengenai rumusan dalam kalimat penelitian yang menunjukkan hasil-hasil yang didapatkan setelah prosesisasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Kantor Camat Sikakap.
2. Sistem informasi berbasis web dapat menyelesaikan kendala pencatatan dan pelaporan barang milik daerah (BMD), serta memudahkan dalam mengakses data dan mengurangi potensi kesalahan input dalam tata kelola barang milik daerah (BMD).
3. Mengembangkan sistem sebelumnya lebih baik, agar lebih mudah dalam memantau, melacak, serta pembuatan laporan di Kantor Camat Sikakap.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan tentang perancangan sistem informasi berbasis web di Kantor Camat Sikakap:

1. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Sebagai pelajaran bagi penulis dalam mengembangkan dan menambah pengetahuan di bidang pemrograman komputer dan sistem pengolahan data, berdasarkan ilmu yang didapatkan di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
 - b. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang sistem informasi.
 - c. Peneliti dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan strata satu (S1), Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

2. Manfaat Bagi Kantor Camat Sikakap

Mempermudah dan meningkatkan kinerja pencatatan, pengelolaan serta pemanfaatan barang milik daerah di Kantor Camat Sikakap

3. Manfaat Bagi Kampus

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang teknologi informasi dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa

1.7 Tinjauan Umum Objek

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang kantor camat sikakap sebagai objek penelitian, mulai dari sejarah singkat, serta struktur organisasi.

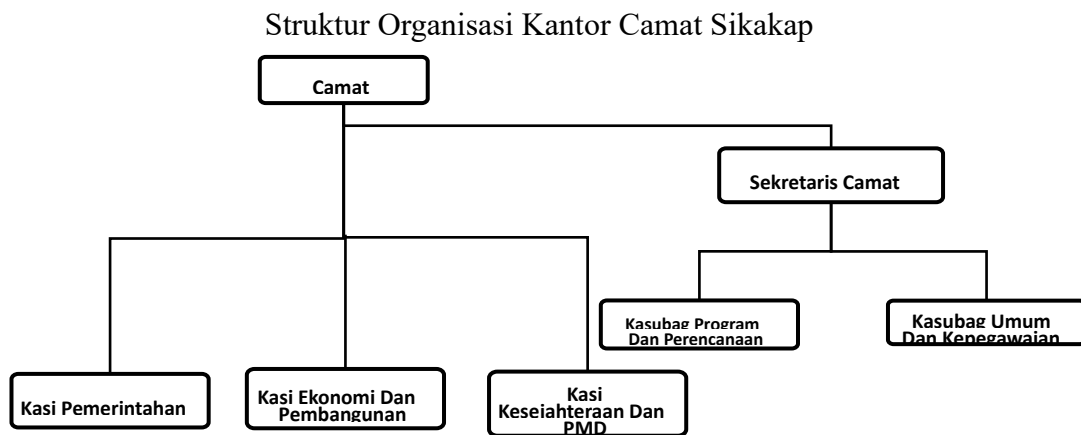
1.7.1 Sejarah Kantor Camat

Kecamatan sikakap resmi dibentuk pada 4 Oktober 1999 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999. Kecamatan Sikakap berkedudukan di Jalan Raya Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari tiga desa, yaitu:

1. Desa Sikakap
2. Desa Taikako
3. Desa Matobe

Pusat pemerintahan kecamatan Sikakap terletak di desa Sikakap yang juga berfungsi sebagai kegiatan sosial dan ekonomi dibagian selatan Kepulauan Mentawai.

1.7.2 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.7.3 Lingkup Pekerjaan

Pada kecamatan sikakap seluruh pekerjaan dibawah naungan pemerintahan daerah (PEMDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayan publik, dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sikakap.

Dalam mengoptimalkan daerah tersebut maka adanya camat, sekretaris camat, kasubag program dan perencanaan, kasubag umum dan kepegawaian, kasi pemerintah, kasi ekonomi dan pembangunan, kasi kesejahteraan dan PMD yang meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan, dan penganggaran.
2. Pengadaan barang.
3. Pencatatan dan inventarisasi.
4. Penggunaan barang.
5. Pemeliharaan dan pengamanan.

6. Pemanfaatan barang.
7. Pelaporan dan pertanggung jawaban.
8. Pengawasan dan audit.